

**TOP-DOWN COLLABORATIVE GOVERNANCE : DINAMIKA KOLABORASI
MULTI AKTOR DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI
KELURAHAN TUGUREJO KOTA SEMARANG**

Rizka Utami¹, Supratiwi²

Email : rizkautami569@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedaro, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dampaknya sangat dirasakan terutama di wilayah pesisir, termasuk Kelurahan Tugurejo. Permasalahan utama dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yaitu kompleksitas terkait isu perubahan iklim yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal, tetapi memerlukan sinergitas lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan program kampung iklim Kelurahan Tugurejo dengan menggunakan model Ansell dan Gash. Fokus dari penelitian ini adalah untuk membedah peran dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dinamika kolaborasi yang terjalin antara aktor pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang ada dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proklamasi Kelurahan Tugurejo cenderung bersifat *top-down*. Ditemukan adanya ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) yang signifikan, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mendominasi sebagai inisiator sekaligus penentu arah kerja. selain itu, desain kelembagaan yang masih bersifat informal dan ketergantungan pada sosok *local hero* menjadikan keberlanjutan program ini rentan terhadap perubahan eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik kolaborasi di Tugurejo lebih bersifat koordinasi instruktif daripada kemitraan setara, sehingga memerlukan penguatan desain kelembagaan yang lebih formal dan redistribusi kekuasaan serta pengetahuan. Sehingga disarankan untuk adanya formalisasi kerjasama secara tertulis dan penguatan regenerasi kepemimpinan di tingkat tapak agar dapat menjamin kemandirian program di masa depan.

Kata Kunci : *Collaborative governance, Proklamasi, Top-Down Collaboration, Stakeholders*

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Climate change is a global phenomenon whose impacts are particularly felt in coastal areas, including Tugurejo Village. The main challenge in climate change adaptation and mitigation efforts lies in the complexity of climate change issues, which cannot be addressed by a single actor but require cross-sectoral synergy. This study aims to analyze collaborative governance practices in the management of the Climate Village program in Tugurejo Village using the Ansell and Gash model. The focus of this study is to examine the roles of stakeholders and the dynamics of collaboration among government actors, academics, the private sector, and the community. The research method employed is descriptive qualitative. Data were collected through in-depth interviews and document analysis. Data analysis was conducted based on the collaborative governance theory developed by Ansell and Gash. The research findings indicate that the Proklim program in Tugurejo Village tends to be top-down in nature. A significant power imbalance was identified, with the Semarang City Environmental Agency dominating as both the initiator and the entity determining the direction of the work. Furthermore, the institutional design, which remains informal, and the reliance on a “local hero” figure make the program’s sustainability vulnerable to external changes. The conclusion of this study is that collaborative practices in Tugurejo are more of an instructive coordination than an equal partnership, thus requiring the strengthening of a more formal institutional design and the redistribution of power and knowledge. Therefore, it is recommended that cooperation be formalized in writing and that leadership regeneration at the grassroots level be strengthened to ensure the program’s autonomy in the future.

Keywords : *Collaborative governance, Proklim, Top-Down Collaboration, Stakeholders*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang semakin kompleks dan berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana lingkungan. Fenomena ini dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (NO₂) yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, penggunaan bahan bakar fosil, dan pengelolaan limbah yang tidak berkelanjutan (Nielwaty et al., 2023).

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat sebesar 0,8°C dan diproyeksikan meningkat hingga 1,4–5,8°C pada tahun 2100 (Rekavianti, 2019). Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, dampak perubahan iklim semakin nyata dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana. Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 3.544 bencana, di mana sekitar 90% di

antaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor (Greenpeace, 2023). Selain itu, kerugian ekonomi akibat bencana lingkungan diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun. Wilayah pesisir menjadi salah satu kawasan paling terdampak, terutama akibat kenaikan muka air laut, banjir rob, dan intrusi air laut. Bahkan, sekitar 23 juta penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir diprediksi akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 (BBC, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi (KLHK, 2017). ProKlim dirancang sebagai program nasional yang diimplementasikan pada skala lokal, dengan menekankan pada penguatan aksi adaptasi, mitigasi, serta dukungan keberlanjutan. Kota Semarang sebagai salah satu wilayah pesisir di Pulau

Jawa memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, khususnya banjir rob dan penurunan muka tanah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 158.137 jiwa terdampak banjir di 40 kelurahan di Kota Semarang (Tribun Pantura, 2024). Salah satu wilayah yang terdampak secara langsung adalah Kelurahan Tugurejo yang mengalami berbagai permasalahan lingkungan, seperti genangan air pada tambak seluas 44,5 hektar serta penurunan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir (Morton et al., 2019). Kondisi ini mendorong perlunya upaya adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat melalui implementasi ProKlim. Kelurahan Tugurejo menjadi menarik untuk dikaji karena telah berhasil meraih predikat ProKlim Lestari pada tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian program secara administratif. tetapi demikian, di balik capaian tersebut, terdapat dinamika kolaborasi antar aktor yang menunjukkan kecenderungan top-down, di mana pemerintah masih menjadi aktor dominan dalam proses pengambilan keputusan dan penggerak utama program. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip *collaborative governance* telah diterapkan secara ideal dalam pengelolaan ProKlim. Penelitian sebelumnya cenderung menekankan pada aspek keberhasilan implementasi program

dan partisipasi masyarakat, namun masih terbatas dalam mengkaji dinamika relasi kekuasaan dan ketimpangan antar aktor dalam perspektif *collaborative governance*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan ProKlim di Kelurahan Tugurejo dengan menggunakan model Ansell dan Gash, khususnya dalam melihat kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tugurejo Kota Semarang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi, serta relasi antar aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Tugurejo sebagai salah satu wilayah pesisir yang terdampak perubahan iklim sekaligus telah memperoleh predikat ProKlim Lestari. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pihak kelurahan), masyarakat Kelurahan Tugurejo, sektor swasta yaitu PT Kawasan

Industri Wijayakusuma, akademisi Universitas Diponegoro, serta lembaga swadaya masyarakat yaitu Yayasan Bina Karta Lestari.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci guna menggali informasi terkait peran aktor, pola interaksi, dan dinamika kolaborasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan, dokumen kebijakan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan kedalaman analisis. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan data.

Analisis penelitian ini mengacu pada kerangka *collaborative governance* dari Ansell dan Gash yang mencakup empat dimensi utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan dinamika relasi antar aktor dalam pengelolaan ProKlim secara komprehensif.

HASIL DAN ANALISIS

Dinamika *Top-down Collaborative governance* dalam Pengelolaan Program Kampung Iklim Di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang

Pengelolaan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kelurahan Tugurejo merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengkonsolidasikan berbagai aktor untuk menghadapi ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir. Tetapi, di balik keberhasilan meraih penghargaan "Proklam Lestari", terdapat kerumitan relasi kuasa yang asimetris. Analisis ini menggunakan empat dimensi besar model *Collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) untuk membedah bagaimana pola *top-down* bekerja di dalam bingkai kolaborasi.

1. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam model Ansell dan Gash (2007) merupakan variabel fundamental yang menentukan dinamika kolaborasi. Di Kelurahan Tugurejo, kondisi ini mencakup sejarah kerja sama, ketidakseimbangan sumberdaya, dan insentif bagi aktor. Berdasarkan hasil penelitian, **sejarah kolaborasi** di Tugurejo sudah terbentuk jauh sebelum Program Kampung Iklim (Proklam) diinisiasi secara formal, terutama melalui keterlibatan LSM Yayasan Bintari sejak 2009 dalam pelestarian mangrove di wilayah pesisir dan pembinaan bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang pada 2010. Tetapi,

sejarah panjang ini tidak serta-merta melahirkan kemandirian lokal. Sebaliknya, kerjasama ini justru menciptakan pola ketergantungan historis di mana masyarakat terbiasa memosisikan diri sebagai objek pendampingan yang pasif. Hal ini menjadi awal mula munculnya dinamika *top-down collaboration*, karena inisiatif lingkungan di Tugurejo cenderung bersifat reaktif terhadap arahan dari eksternal, bukan merupakan gerakan organik yang tumbuh dari aspirasi dan kesadaran masyarakat yang ada di tingkat lokal.

Ketidakseimbangan kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan menjadi indikator kedua yang mempertegas dominasi pemerintah. Terdapat jurang yang sangat lebar antara DLH Kota Semarang dengan Pemerintah Kelurahan maupun kelompok masyarakat. DLH memiliki otoritas dalam penetapan standar keberhasilan program dan akses terhadap anggaran APBD, sementara pemerintah Kelurahan Tugurejo menghadapi keterbatasan wewenang teknis dan juga dukungan anggaran yang membuat peran mereka terbatas pada dukungan administratif saja. Ketimpangan ini diperparah dengan ketidakseimbangan pengetahuan, di mana pemahaman mendalam mengenai indikator teknis penilaian Proklam dari KLHK hanya dikuasai oleh elit birokrasi di tingkat kota. Masyarakat di tingkat tapak hanya dibekali

pengetahuan praktis tanpa memahami urgensi kebijakan adaptasi mitigasi iklim.

Insentif untuk berkolaborasi dalam konteks Tugurejo lebih didominasi oleh motivasi instrumental daripada kesadaran lingkungan intrinsik. Bagi DLH, keberhasilan Proklamasi merupakan representasi prestasi kerja daerah yang mendongkrak citra Kota Semarang. Bagi sektor swasta, seperti PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), keterlibatan merupakan mekanisme mendapatkan legitimasi sosial dan memenuhi kewajiban regulasi CSR. Pola *top-down* semakin kuat ketika pemerintah menggunakan insentif ini sebagai instrumen untuk dapat menarik partisipasi masyarakat agar sesuai dengan target administratif nasional, yang secara tidak langsung mengabaikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

2. Desain Kelembagaan

Indikator kedua dalam pengelolaan proklamasi di Kelurahan Tugurejo yang dianalisis menggunakan teori *collaborative governance* yaitu desain Kelembagaan. Mengacu pada *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007), Desain Kelembagaan merupakan sebuah protokol dan aturan dasar dalam berkolaborasi sangat vital bagi legitimasi prosedural di dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan meliputi inklusifitas partisipatif, memiliki aturan dasar tertulis yang jelas, dan proses yang transparan.

Tetapi di Tugurejo, desain kelembagaan justru menjadi celah bagi penguatan kontrol pemerintah melalui pola yang tidak terstruktur secara legal-formal. Protokol dasar dalam kolaborasi ini ditemukan sangat lemah dalam aspek formalitas, sebagian besar interaksi lintas sektor dilakukan tanpa dukungan dokumen hukum yang mengikat seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mendetail mengenai pembagian hak dan kewajiban. Ketiadaan aturan formal secara tertulis mengakibatkan pembagian tugas antar aktor menjadi kabur dan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, hal ini menjadikan DLH Kota Semarang sebagai pemegang sumber daya terbesar sehingga secara otomatis memiliki peran yang besar dan penentu arah gerak kolaborasi.

Aspek inklusivitas dan transparansi dalam desain kelembagaan menunjukkan kecenderungan yang elitis. Meskipun secara fisik Proklamasi melibatkan banyak warga dalam aksi lingkungan, tetapi proses pengambilan keputusan strategis hanya melibatkan segelintir elit lokal dan pejabat dinas. Selain itu Desain kelembagaan yang cenderung eksklusif ini mengukuhkan struktur *top-down*, di mana arus informasi mengalir linear dari atas tanpa adanya mekanisme umpan balik yang berasal dari masyarakat.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan penggerak kolaborasi yang seharusnya berperan sebagai mediator dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Tetapi, di Kelurahan Tugurejo kepemimpinan cenderung bersifat direktif. DLH Kota Semarang berperan dominan sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus pengendali program. Peran ini memang efektif dalam mendorong implementasi program secara cepat, namun di sisi lain mengurangi ruang bagi aktor lain. Kepemimpinan yang seharusnya bersifat fasilitatif justru berubah menjadi instruktif, karena fokus pemimpin di tingkat birokrasi lebih ditekankan pada efisiensi hasil fisik dan administratif daripada kualitas proses kolaboratif yang mampu melibatkan semua aktor dengan setara.

Dinamika kepemimpinan dalam kolaborasi juga sangat dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap sosok *local hero*. Figur *local hero* berperan sebagai instrumen perantara kebijakan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah tanpa memerlukan proses yang berbelit-belit. Meskipun kehadiran tokoh lokal ini menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya pencapaian sebagai proklamasi lestari, hal ini menciptakan kerentanan sistemik bagi keberlanjutan Proklamasi di Kelurahan Tugurejo. Pola kepemimpinan yang ada dengan menjadikan

ketergantungan pada tokoh *local hero* ini menunjukkan strategi pemerintah dalam menggunakan modal sosial demi kepentingan pencapaian target kerja instansi yang bersifat *top-down*.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam teori Ansell dan Gash mencakup siklus dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pencapaian pemahaman bersama.

Pertama, **Dialog tatap muka**, mengacu pada Ansell dan Gash (2007) Dialog tatap muka merupakan mekanisme untuk menyelaraskan visi, dan kunci untuk dapat memecahkan hambatan informasi serta menyelesaikan masalah perbedaan kepentingan antar aktor. Tetapi, pada pengelolaan proklamasi Kelurahan Tugurejo dialog tatap muka seringkali tidak digunakan sebagai ruang untuk musyawarah negosiasi kepentingan, melainkan forum sosialisasi di mana DLH memberikan arahan teknis kepada pengurus Proklamasi dan juga kepada masyarakat. Selain itu pertemuan tatap muka pada pengelolaan Proklamasi Kelurahan Tugurejo sudah hanya dilakukan sekali tempo saja ketika sedang akan ada event. Pertemuan atau forum yang melibatkan semua aktor dalam satu waktu dan tempat yang sama relatif jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan, sehingga intensitas diskusi antar aktor

menjadi kurang baik. kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika konflik dalam kolaborasi tidak selalu muncul dalam hal perbedaan pendapat, tetapi bisa juga melalui minimnya forum bersama yang menyebabkan perbedaan kepentingan antar aktor tidak pernah dimunculkan dalam suatu ruang dialog kolektif. Dalam hal ini, komunikasi dan koordinasi berlangsung secara terbatas atau hanya melalui aktor tertentu yang memiliki peran dominan.

Kedua, **membangun kepercayaan** berjalan secara terbatas. Pembangunan kepercayaan dalam proses ini didasarkan pada kinerja fisik yang terlihat (*performance-based trust*), bukan pada visi bersama yang mendalam. Aktor lain seperti DLH Kota Semarang dan juga PT KIW memberikan dukungan anggaran karena pengurus proklam mampu untuk memberikan hasil nyata di lapangan. Tetapi, dengan sistem membangun kepercayaan yang seperti ini dan bergantung pada capaian yang dapat dilaporkan secara administratif, akan membuat kerjasama menjadi rapuh. Kepercayaan antar aktor. Tetapi demikian tingkat kepercayaan antar aktor tidak terbangun secara merata, seperti halnya hubungan pengurus proklam dengan pemerintah Kelurahan Tugurejo cenderung kurang baik. proses membangun kepercayaan yang dilakukan oleh pengurus

proklam dan pemerintah Kelurahan Tugurejo terbangun secara lemah, hal ini terjadi karena berbagai faktor yang telah terjadi pada masa lampau dan bersifat berulang serta bukan karena hanya satu kejadian saja.

Ketiga yaitu **komitmen terhadap proses**, Komitmen terhadap proses kolaborasi terlihat dalam keberlanjutan program dan partisipasi aktor. Tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa komitmen tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan eksternal dari pemerintah, seperti target program dan evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen belum sepenuhnya berbasis kesepakatan kolektif yang kuat. Selain itu komitmen terhadap proses juga cenderung fluktuatif mengikuti penilaian penghargaan nasional. Komitmen masyarakat meningkat ketika akan diadakannya verifikasi lapangan untuk didaftarkan kedalam kategori proklam lestari, tetapi menurun ketika penghargaan tersebut sudah diraih. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang ada bukan merupakan komitmen untuk melakukan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim untuk kelestarian lingkungan, tetapi karena komitmen administratif terhadap prestise pemerintah.

Keempat yaitu **pemahaman bersama**, menurut Ansell dan Gash (2007) pemahaman bersama merujuk ketika para

aktor yang berpartisipasi dalam proses kolaborasi memiliki pemahaman yang seragam mengenai permasalahan dan tujuan dari proses kolaborasi yang dijalankan. Tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa Pengurus inti, pemerintah, dan akademisi sangat memahami esensi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, tetapi dari aktor masyarakat justru menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa aktor masyarakat tidak memiliki kesamaan visi mengenai masalah utama yang tengah dihadapi, dan cenderung hanya terlibat secara pasif dan hanya mengikuti instruksi. Sementara DLH memahami Proklamasi sebagai strategi nasional mitigasi emisi gas rumah kaca, masyarakat memahaminya sebatas lomba kebersihan atau penghijauan. Masyarakat bergerak karena imbauan pemimpin lokal atau harapan bantuan material, bukan karena kesadaran akan ancaman perubahan iklim bagi wilayah pesisir mereka.

Terakhir yaitu **hasil sementara**, dalam proses kolaborasi terlihat dalam meningkatnya inovasi yang ada kelompok masyarakat lokal seperti pemanfaatan sampah anorganik yang tidak layak jual dimanfaatkan menjadi sabun, lilin aromaterai, dan tas belanja yang membahas dasar limbah plastik, selain itu juga memanfaatkan limbah organik menjadi kompos dan ecoenzim. Hal ini selain

menambah nilai guna limbah juga memperlambat laju kerusakan lingkungan dan mengurangi peningkatan dari emisi gas rumah kaca, utamanya metana yang muncul dari adanya pembusukan sampah organik di TPA dan juga pembakaran sampah anorganik. Kemudian juga penguatan kelembagaan lokal, karena relasi kerjasama yang terus bertambah dan juga peningkatan jumlah prestasi yang di dapatkan, hal ini dapat menjadi modal legitimasi untuk mendapatkan perhatian pihak luar, seperti sektor akademisi untuk dapat menjadikan wilayah Kelurahan Tugurejo sebagai laboratorium lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan proklamasi Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa keberhasilan program kampung iklim di Kelurahan Tugurejo merupakan representasi kemenangan yang diporelasi oleh pemerintah, bukan kemenangan yang diperoleh oleh masyarakat. walaupun Kelurahan Tugurejo berhasil meraih penghargaan tertinggi tingkat nasional, tetapi kesuksesan tersebut diperoleh dengan cara kerja yang satu arah dari bawah ke atas (*top-down*). Dominasi yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang tidak hanya sekedar memenuhi fungsi sebagai kepemimpinan,

melainkan menjadi aktor tunggal yang menentukan keberlanjutan dan inisiatif program yang ada di tingkat tapak.

Kerjasama yang terjalin lebih merupakan instrumen dari birokrasi untuk dapat mencapai target penghargaan, daripada sebuah transformasi tata kelola lokal yang lebih mandiri. *Collaborative governance* tidak sepenuhnya berlangsung dalam pola interaksi yang setara antar aktor. Meskipun berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program, tetapi distribusi dan sumber daya yang tidak merata. Selain itu ketimpangan sumber daya dan juga ketiadaan desain kelembagaan yang secara formal melandasi proses kolaborasi telah menjebak kolaborasi ini dalam sebuah siklus yang ketergantungan. Kelurahan Tugurejo yang seharusnya memiliki peran penting, justru menyerahkan kendali sepenuhnya kepada DLH Kota Semarang dan figur *local hero*. Hal ini menimbulkan kolaborasi yang tidak setara, di mana keterlibatan masyarakat masih pada hal yang berfokus pada mobilisasi tenaga, tanpa dilibatkan pada proses yang substantif. Sehingga keberhasilan kecil yang diraih sifatnya sangat rapuh, dan sangat rentan terhadap guncangan terlebih jika terjadi transisi kepemimpinan atau pergeseran kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi.

Sehingga dalam penelitian ini menegaskan bahwa kemajuan dan progress

dalam *incremental collaboration* hanya akan menjadi keberhasilan semu jika tidak dibarengi dengan redistribusi kekuasaan dan juga pengetahuan yang merata. Sehingga esensi dari *collaborative governance* yang ideal bukanlah pada seberapa banyak program yang sudah dijalankan, tetapi kemampuan aktor dalam melakukan kolaborasi tersebut untuk bertahan tanpa adanya otoritas negara ataupun peran aktor lain yang lebih dominan.

SARAN

Saran pertama bagi Pemerintah Kelurahan Tugurejo diharapkan mampu untuk dapat mengambil peran yang lebih proaktif dan tidak hanya sekedar menjadi fasilitator administratif. Pemerintah kelurahan perlu untuk mengalokasikan waktu untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Proklim Tugurejo agar tidak terjadi kesalahpahaman antar aktor.

Kedua, Bagi DLH Kota Semarang Perlu untuk dilakukannya pembuatan perjanjian kerja yang formal dan terlembaga dengan baik melalui penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau perjanjian kerjasama tertulis yang lebih mendetail dengan pihak swasta, hal ini penting dikarenakan dapat digunakan untuk menjamin keberlanjutan dukungan dalam proses kolaborasi. Serta mulai melibatkan

masyarakat bukan hanya pada tahap pelaksanaan tetapi juga perencanaan.

Terakhir, bagi Pengurus Proklam Tugurejo Perlu untuk dilakukannya regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan Proklam Tugurejo sejak dini, dikarenakan peran *local hero* yang terlalu dominan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada aktor tertentu. Selain itu juga, pengurus perlu untuk meperluas peningkatan edukasi kepada warga umum secara keseluruhan, agar keterlibatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mamahami esensi dari proklam terlebih terkait aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azizah Nur Sheiva, Siti Latipah, & Ika Oktaviani (2023). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kampung Iklim Di Wilayah Kota Tangerang. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang* Vol. 1, No. 2, hlm 161-179
- Ansell, Chris & Alison Gash. (2007). *Collaborative governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:543–571
- Budimanta, Arif, Adi Prasetyo, Dan Bambang Rudito. 2008. *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Diposaptono, Subandono Dkk. 2009. 'Menyiasati Perubahan Iklim Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil'. Bogor : Buku Ilmiah Populer
- KLHK. 2017. Road Map Program Kampung Iklim (Proklam). Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jakarta:SPARC
- Mayer, M., dan Kenter, R. 2016. *The Prevailing Elements of Public Sector Collaboration*. Dalam . C. Morris, dan K. Miller Steves, *Advancing Collaboration Theory: Models, Typologies, and Evidence*, New York Routledge.
- Morton, S., Pencheon, D., & Bickler, G. (2019). The Sustainable Development Goals Provide An Important Framework For Addressing Dangerous Climate Change And Achieving Wider Public Health Benefits. *Public Health*, 174, 65–68
- Nilamsari, Natalina . (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana Volume XIII No.2*, hlm 178
- Nielwaty, Elly, Fara Meriansari Dan Hermanto. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim (Proklam) Studi Pada RW12 Kelurahan Umbansari Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. Vol 3 No, 2. Hal 44
- O'Flynn, Janine and John Wanna. (2008). *Collaborative governance A new era of public policy in Australia?*. Canberra : Australian National University E Press
- Oktaviana, Feni Rezki, Edison, & ramadhani Setiawan (2021). Analisis Jejaring Aktor Dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 19, Nomor 3: 251-261

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.84/MENLHK-
SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang
Program Kampung Iklim

Peraturan Direktur Jendral Pengendalian
Perubahan Iklim Nomor
P.1/PPI/SET/KUM.1/2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Proklam

Ramdani, Jaka & Risna Resnawaty (2021).
Kolaborasi multi pihak pada
program kampung iklim di
kabupaten cilacap. Jurnal
Kolaborasi Resolusi Konflik,
Volume 3, Nomor 2 : 191-198

Rekavianti, Elsy. (2019). Partisipasi
Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Program Kampung Iklim (Proklam)
Di Kelurahan Cepoko Kecamatan
Gunungpati Kota Semarang. Hal 1